PENGARUH KAPASITAS FISKAL DAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Felisito Yogi Sanak
NPP. 33.0671
Program Studi Keuangan Publik
Email: sanakyogi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Arina Romarina, S.E, M.Ec, Dev
Email: arina_romarina@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The author focuses on the issue of low fiscal capacity and low levels of regional financial independence, which in turn leads to high dependence on central government transfer funds in North Central Timor Regency. This, in turn, limits the local government's fiscal space to encourage and maximize optimal and sustainable economic development.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the influence of fiscal capacity and the level of regional financial independence on economic development in North Central Timor Regency.* ***Method:*** *This study employed a quantitative approach with descriptive and inferential statistical analysis techniques. Data collection was conducted through documentation from the Central Statistics Agency, the Directorate General of Fiscal Balance, the Supreme Audit Agency, and the Regional Finance and Assets Agency of North Central Timor Regency for the 2015-2024 period.* ***Result:*** *The results show that fiscal capacity and regional financial independence, both partially and simultaneously, have a significant effect on reducing poverty levels and increasing the HDI. However, these two variables do not have a significant effect on economic growth, GRDP per capita, and the open unemployment rate. The coefficient of determination indicates that the model is able to explain 51.9% of the variation in the poverty rate and 54.6% in the Human Development Index (HDI).* ***Conclusion:*** *This study concludes that fiscal capacity and regional financial independence have a significant but limited influence on economic development in North Central Timor Regency, particularly on poverty reduction and human development index improvement. It is recommended that local governments optimize local revenues, strengthen the effectiveness of productive spending, and improve financial governance to encourage more optimal and sustainable economic development.*

Keywords: *Capacity; Development; Fiscal; Growth; Independence; Poverty.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya kapasitas fiskal dan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang kemudian akan menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal inilah kemudian akan berdampak pada terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah dalam mendorong dan memaksimalkan pembangunan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2015-2024. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, maupun tingkat pengangguran terbuka. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 51,9% variasi pada tingkat kemiskinan dan 54,6% pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan memiliki pengaruh yang signifikan namun terbatas terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya pada aspek penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memperkuat efektivitas belanja produktif, serta meningkatkan tata kelola keuangan daerah guna mendorong pembangunan ekonomi yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Kata kunci: Fiskal; Kapasitas; Kemandirian; Kemiskinan; Pembangunan; Pertumbuhan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah mendorong penerapan desentralisasi fiskal menjadi semakin terarah, sehingga menjadikannya motor penggerak reformasi pembangunan nasional. Saat ini, kewenangan utama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan pembangunan, hingga melakukan pengendalian berada pada pemerintah daerah, yang juga memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan secara mandiri.

Pengelolaan keuangan yang dilimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan wujud konseptual dari desentralisasi fiskal, yang sekaligus mencerminkan bentuk kepercayaan dalam rangka memperkuat kemandirian daerah (Dadang, 2020:77). Tujuannya ialah mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada dua isu utama yang menjadi sorotan pada kebijakan ini, ialah kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kemandirian keuangan daerah. Kemampuan keuangan yang dimiliki tiap daerah dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dirumuskan dalam konsep Kapasitas Fiskal Daerah

(KFD). Menurut (Stiglitz, 2000:112), kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai fungsi pemerintahan.

Kemandirian keuangan daerah diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara otonom melalui pemanfaatan berbagai sumber penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi, dan PAD (Halim, 2007:25). Tujuannya ialah mewujudkan pemerintah daerah yang sehat, tidak bergantung pada dana transfer, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), merupakan salah satu contoh daerah yang dicirikan oleh kapasitas fiskal rendah disertai ketergantungan fiskal yang tinggi. Meskipun memiliki posisi geografis yang strategis, kemampuan fiskal dan tingkat kemandirian keuangan TTU masih tergolong rendah. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal tercermin dari minimnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTU pada periode 2015-2019 masih berada di kisaran 4,70% hingga 5,10%, namun mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 sebesar -0,65% akibat pandemi COVID-19. Meskipun mulai pulih pada tahun-tahun berikutnya, tingkat pertumbuhan ekonomi TTU masih berada di bawah rata-rata provinsi NTT yang mencapai 4,5% pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten TTU masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 20,89% pada tahun 2024, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 9,03%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTU juga masih berada pada kategori sedang dengan angka 62,27 pada tahun 2024, masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi NTT.

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024) menunjukkan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten TTU selama periode 2015-2024 sebagian besar berada pada kategori "Sangat Rendah" hingga "Rendah", dengan nilai tertinggi hanya mencapai 2,055 (kategori "Sedang") pada tahun 2022. Sementara itu, Indeks Kemandirian Keuangan Kabupaten TTU juga masih berada pada kategori "Rendah" hingga "Sedang", dengan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata hanya sekitar 30-40% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten TTU masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 60% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji pengaruh kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang masih menghadapi permasalahan rendahnya kapasitas fiskal, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah berlangsung lebih dari dua dekade di Indonesia, masih terdapat kesenjangan (*research gap*) yang signifikan antara tujuan teoritis kebijakan tersebut dengan realisasi di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu:

Pertama, kesenjangan empiris terkait pengaruh kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan terhadap pembangunan ekonomi. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menggunakan satu atau dua indikator pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi atau IPM saja (Kurniati & Purwadinata, 2025; Sri Adipura et al., 2022). Belum banyak penelitian yang secara komprehensif menguji pengaruh kedua variabel fiskal tersebut terhadap lima indikator pembangunan ekonomi sekaligus: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka. Padahal, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan seharusnya mencerminkan kemajuan di seluruh dimensi tersebut, bukan hanya pada aspek pertumbuhan semata.

Kedua, kesenjangan kontekstual mengingat sebagian besar studi tentang kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan dilakukan di daerah dengan karakteristik ekonomi yang relatif maju atau sedang berkembang (Nabillia *et al.*, 2023) dan (Arafah, 2023). Sangat terbatas penelitian yang secara spesifik meneliti daerah 3T seperti Kabupaten TTU yang memiliki tingkat kapasitas fiskal "sangat rendah", ketergantungan pada dana transfer pusat di atas 60%, serta struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian tradisional. Karakteristik unik ini menyebabkan temuan dari daerah lain belum tentu dapat digeneralisasikan ke konteks TTU.

Ketiga, kesenjangan metodologis terletak pada terbatasnya penggunaan data *time series* jangka panjang (10 tahun terakhir) yang mencakup masa sebelum, selama, dan pasca pandemi COVID-19. Periode 2015-2024 merupakan rentang waktu kritis yang mencerminkan dinamika kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Studi-studi sebelumnya umumnya menggunakan periode pengamatan yang lebih pendek atau tidak mencakup masa pemulihan pasca-pandemi.

Keempat, kesenjangan teoritis muncul dari masih lemahnya eksplanasi mengenai mekanisme transmisi kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan terhadap indikator pembangunan ekonomi yang berbeda-beda. Mengapa kedua variabel fiskal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan IPM, tetapi tidak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran? Pertanyaan ini belum terjawab secara memadai dalam konteks daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi seperti TTU.

Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan bukti empiris yang valid dan kontekstual bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Timor Tengah Utara serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan publik dan ekonomi daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk segera dilaksanakan mengingat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) masih menghadapi permasalahan fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung pada lambatnya pencapaian pembangunan ekonomi. Terdapat tiga alasan utama mengapa penelitian ini menjadi mendesak.

Pertama, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024), Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten TTU selama periode 2015-2024 sebagian besar berada pada kategori "Sangat Rendah" hingga "Rendah", dengan nilai tertinggi hanya mencapai 2,055 (kategori "Sedang") pada tahun 2022. Sementara itu, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat mencapai lebih dari 60% dari total pendapatan daerah, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang fluktuatif dan hanya berkisar 30-40% per tahun. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah dalam mendorong dan memaksimalkan pembangunan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah akan kekurangan dasar empiris yang kuat untuk mengetahui sejauh mana kapasitas fiskal yang terbatas dan ketergantungan fiskal yang tinggi benar-benar memengaruhi berbagai indikator pembangunan ekonomi secara faktual.

Kedua, indikator pembangunan ekonomi Kabupaten TTU masih menunjukkan kinerja yang memprihatinkan. Tingkat kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 20,89%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,03%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada kategori sedang dengan angka 62,27, masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan ekonomi TTU pada periode pasca-pandemi juga masih berada di bawah rata-rata provinsi NTT yang mencapai 4,5% pada tahun 2024. Tanpa adanya penelitian yang menganalisis pengaruh kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan terhadap kelima indikator pembangunan ekonomi tersebut secara komprehensif, maka perumusan strategi pengembangan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Ketiga, Kabupaten TTU memiliki karakteristik unik sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Karakteristik ini menyebabkan temuan dari penelitian di daerah lain tidak dapat begitu saja digeneralisasikan ke konteks TTU. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kapasitas fiskal, kemandirian keuangan, dan pembangunan ekonomi di daerah 3T sangat penting mengingat daerah-daerah seperti TTU seringkali menjadi prioritas penerima dana transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Tanpa bukti empiris yang valid, efektivitas belanja transfer tersebut tidak dapat diukur secara akurat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan karena akan memberikan gambaran empiris mengenai besaran dan arah pengaruh kapasitas fiskal serta kemandirian keuangan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten TTU. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh (Kurniati Kurniati and Subhan Purwadinata, 2025) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa kapasitas fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun secara simultan berpengaruh positif ketika dikombinasikan dengan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, (Salma Nazikha and Rahmawati, 2021) dalam penelitiannya di tingkat nasional menunjukkan bahwa kapasitas fiskal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada cakupan indikator pembangunan ekonomi yang lebih luas (lima indikator) dan fokus lokasi yang lebih spesifik di Kabupaten TTU.

Penelitian oleh (Sri Adipura, Rahayu and Junaidi, 2022) di Provinsi Jambi menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini berbeda dengan dugaan sementara dalam penelitian ini, dimana kemandirian keuangan di Kabupaten TTU yang masih sangat rendah diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena karakteristik daerah 3T yang memiliki ketergantungan fiskal jauh lebih tinggi.

(Arafah, 2023) di Kabupaten Kotawaringin Barat menegaskan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan yang akan diuji, namun Arafah hanya menggunakan kemandirian keuangan sebagai variabel independen tunggal, sementara penelitian ini menambahkan kapasitas fiskal serta memperluas indikator pembangunan ekonomi. Demikian pula penelitian Nabillia dkk. (2023) di Kalimantan Barat menemukan bahwa kemandirian keuangan berperan menurunkan kemiskinan melalui optimalisasi belanja pemerintah.

Dalam skala internasional, (Murshed *et al.*, 2022) dalam studi lintas negara menemukan bahwa kapasitas fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial di negara berkembang. Meskipun relevan secara teoretis, penelitian tersebut belum mampu menangkap kekhususan lokal Kabupaten TTU sebagai daerah perbatasan dengan kapasitas fiskal sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan yang akan diisi oleh penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian hanya menggunakan satu atau dua indikator pembangunan ekonomi, belum ada yang menggunakan lima indikator sekaligus secara komprehensif. Kedua, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji daerah 3T seperti Kabupaten TTU. Ketiga, penelitian dengan periode data 10 tahun yang mencakup masa sebelum, selama, dan pasca pandemi COVID-19 masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan ilmu keuangan publik serta kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan identifikasi kesenjangan dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki sejumlah kebaruan ilmiah (*novelty*) yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Kebaruan tersebut mencakup aspek konteks objek penelitian, cakupan indikator, periode waktu, serta pendekatan analisis yang digunakan.

Pertama, dari aspek konteks objek penelitian, kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan lokasi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten TTU memiliki karakteristik unik sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Karakteristik ini menyebabkan Kabupaten TTU memiliki kapasitas fiskal yang sangat rendah dengan indeks kapasitas fiskal sebagian besar berada pada kategori "Sangat Rendah" hingga "Rendah" serta tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 60% dari total pendapatan daerah. Belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji pengaruh kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan terhadap pembangunan ekonomi di daerah dengan karakteristik ekstrem seperti Kabupaten TTU. Penelitian sebelumnya umumnya dilakukan di daerah dengan tingkat kemajuan ekonomi yang relatif lebih baik, seperti Provinsi NTB, Provinsi Jambi, atau Kalimantan Barat.

Kedua, dari aspek cakupan indikator pembangunan ekonomi, penelitian ini menggunakan lima indikator sekaligus sebagai variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kebaruan ini sangat signifikan karena penelitian terdahulu umumnya hanya menggunakan satu atau dua indikator, seperti pertumbuhan ekonomi saja (Kurniati & Purwadinata, 2025), atau pertumbuhan ekonomi dan IPM (Sri Adipura et al., 2022), atau pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Nabillia et al., 2023). Dengan menggunakan lima indikator sekaligus, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik mengenai pengaruh kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan terhadap berbagai dimensi pembangunan ekonomi, baik yang bersifat makro ekonomi murni maupun yang bersifat kesejahteraan sosial.

Ketiga, dari aspek periode waktu, penelitian ini menggunakan data *time series* tahunan selama 10 tahun terakhir, yaitu periode 2015-2024. Kebaruan periode ini terletak pada cakupan waktu yang mencakup tiga fase penting, yaitu masa sebelum pandemi COVID-19 (2015-2019), masa puncak pandemi (2020-2021), serta masa pemulihan pasca pandemi (2022-2024). Periode yang panjang dan dinamis ini memungkinkan analisis yang lebih akurat mengenai stabilitas dan ketahanan pengaruh kapasitas fiskal serta kemandirian keuangan terhadap pembangunan ekonomi dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan periode yang lebih pendek, misalnya 2019-2023 (Kurniati & Purwadinata, 2025) atau 2016-2019 (Sri Adipura et al., 2022), sehingga belum mampu menangkap dinamika jangka panjang dan dampak krisis multidimensional akibat pandemi.

Keempat, dari aspek metodologis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diterapkan secara terpisah untuk masing-masing dari lima indikator pembangunan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara spesifik indikator mana yang paling dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan, serta indikator mana yang tidak terpengaruh. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menggunakan satu model regresi dengan satu indikator dependen. Dengan pendekatan ini, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan penting mengapa kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, maupun tingkat pengangguran terbuka.

Kelima, dari aspek kontribusi praktis, kebaruan penelitian ini terletak pada rekomendasi kebijakan yang sangat kontekstual dan spesifik untuk Kabupaten TTU. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menghasilkan rekomendasi umum, penelitian ini memberikan arahan

yang disesuaikan dengan kondisi riil daerah, seperti perlunya optimalisasi potensi PAD di sektor pertanian tradisional yang menjadi dominasi ekonomi TTU, penguatan administrasi perpajakan daerah, serta realokasi belanja daerah dari belanja rutin menuju belanja modal yang lebih produktif.

Dengan demikian, secara keseluruhan penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang komprehensif, baik dari segi konteks objek, cakupan indikator, periode waktu, pendekatan metodologis, maupun kontribusi praktisnya. Kebaruan-kebaruan ini menjadikan penelitian ini layak dan penting untuk dilaksanakan guna memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan publik serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen (kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan) terhadap variabel dependen (pembangunan ekonomi) melalui pengukuran data numerik dan analisis statistik. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur besaran pengaruh antar variabel secara objektif dan menggeneralisasi temuan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data sekunder yang berkaitan dengan kapasitas fiskal, tingkat kemandirian keuangan daerah, dan pembangunan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara. Sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) dengan mengambil seluruh data time series tahunan periode 2015-2024 (10 tahun observasi). Data tersebut meliputi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD), Indeks Kemandirian Keuangan Daerah (IKKD), pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dari sumber resmi: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Instrumen penelitian berupa lembar pengumpul data yang disusun berdasarkan operasionalisasi variabel.

Teknik analisis data meliputi: (1) analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik data; (2) uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi); (3) analisis regresi linear berganda; (4) uji hipotesis (uji t parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi R^2). Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 29 for Windows.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan fokus lokasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2026, dengan periode data yang dianalisis mencakup tahun 2015 hingga 2024.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh kapasitas fiskal (X1) dan tingkat kemandirian keuangan (X2) terhadap pembangunan ekonomi (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan teori yang digunakan, pembangunan ekonomi diukur melalui lima indikator: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

3.1. Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi

Hasil uji parsial (uji t) pengaruh kapasitas fiskal terhadap masing-masing indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Pengaruh Kapasitas Fiskal (X_1) Terhadap Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator Pembagunan Ekonomi	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	-0,914	-0,660	0,530	Tidak berpengaruh signifikan
PDRB Per Kapita	-0,698	-0,495	0,636	Tidak berpengaruh signifikan
Tingkat Kemiskinan	-1,887	-2,685	0,031	Berpengaruh signifikan (negatif)
Indeks Pembangunan Manusia	0,637	2,881	0,024	Berpengaruh signifikan (positif)
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,999	1,079	0,316	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data Sekunder 2026

Berdasarkan Tabel 1, kapasitas fiskal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Sig. = 0,031) dengan arah negatif, artinya peningkatan kapasitas fiskal diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Kapasitas fiskal juga berpengaruh signifikan terhadap IPM (Sig. = 0,024) dengan arah positif, artinya peningkatan kapasitas fiskal diikuti oleh peningkatan IPM. Namun, kapasitas fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, maupun TPT.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal lebih berperan dalam aspek kesejahteraan sosial dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara langsung. Hal ini sejalan dengan

penelitian (Kurniati Kurniati and Subhan Purwadinata, 2025) yang menemukan bahwa kapasitas fiskal secara parsial dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat memberikan dampak positif apabila dikombinasikan dengan kebijakan belanja yang tepat. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan (Stiglitz, 2000) bahwa kapasitas fiskal bukan hanya menggambarkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan, tetapi juga sejauh mana pendapatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi

Hasil uji parsial (uji t) pengaruh kemandirian keuangan terhadap masing-masing indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Pengaruh Kapasitas Fiskal (X_2) Terhadap Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator Pembagunan Ekonomi	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	-1,261	-0,134	0,897	Tidak berpengaruh signifikan
PDRB Per Kapita	-0,095	-0,010	0,992	Tidak berpengaruh signifikan
Tingkat Kemiskinan	-8,362	-2,451	0,043	Berpengaruh signifikan (negatif)
Indeks Pembangunan Manusia	6,299	2,383	0,046	Berpengaruh signifikan (positif)
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,784	0,443	0,671	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data Sekunder 2026

Berdasarkan Tabel 2, kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Sig. = 0,043) dengan arah negatif, artinya peningkatan kemandirian keuangan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Kemandirian keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap IPM (Sig. = 0,046) dengan arah positif, artinya peningkatan kemandirian keuangan diikuti oleh peningkatan IPM. Namun, kemandirian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, maupun TPT.

Temuan ini didukung oleh penelitian (Arafah, 2023) yang menegaskan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian (Nabillia *et al.*, 2023) juga menemukan bahwa kemandirian keuangan berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui optimalisasi belanja pemerintah. Secara teoritis, temuan ini

memperkuat teori (Halim, 2007) bahwa kemandirian keuangan daerah yang tinggi memungkinkan daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program kesejahteraan masyarakat.

3.3. Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi

Hasil uji simultan (uji F) pengaruh kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan secara bersama-sama terhadap masing-masing indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Pengaruh Simultan Kapasitas Fiskal (X_1) dan Kemandirian Keuangan (X_2) terhadap Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator Pembagunan Ekonomi	F-hitung	F-tabel	Sig.	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	0,236	4,737	0,796	Tidak berpengaruh signifikan
PDRB Per Kapita	0,152	4,737	0,862	Tidak berpengaruh signifikan
Tingkat Kemiskinan	4,780	4,737	0,047	Berpengaruh signifikan (negatif)
Indeks Pembangunan Manusia	4,824	4,737	0,045	Berpengaruh signifikan (positif)
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,584	4,737	0,583	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data Sekunder 2026

Berdasarkan Tabel 3, kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (F-hitung = 4,780 > F-tabel = 4,737; Sig. = 0,047) dan IPM (F-hitung = 4,824 > F-tabel = 4,737; Sig. = 0,045). Namun, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan TPT.

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan sebesar 51,9% dan IPM sebesar 54,6%. Sementara itu, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 6,3%, PDRB per kapita 4,2%, dan TPT 14,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak faktor lain di luar model yang mempengaruhi indikator-indikator tersebut, seperti investasi, kualitas belanja daerah, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari penurunan kemiskinan dan peningkatan

IPM. Hal ini sejalan dengan pandangan (Brundtland, 2017) bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah jumlah sampel yang relatif kecil (n=10) karena menggunakan data *time series* tahunan selama satu dekade. Hal ini mempengaruhi kekuatan uji statistik (*statistical power*). Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat tentatif dan perlu diuji lebih lanjut dengan periode waktu yang lebih panjang atau menggunakan data panel antar daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, maupun tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut karena mengindikasikan adanya pola hubungan yang berbeda antara variabel fiskal dengan berbagai dimensi pembangunan ekonomi.

Pertama, kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan IPM dikarenakan pola alokasi belanja daerah di Kabupaten TTU yang lebih banyak diarahkan pada program-program sosial dan pelayanan publik dasar. Peningkatan kapasitas fiskal, meskipun kecil, cenderung dialokasikan untuk belanja yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi kesehatan, bantuan operasional sekolah, dan program perlindungan sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan (Arafah, 2023) bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui belanja yang berpihak pada masyarakat miskin. Demikian pula, peningkatan IPM yang signifikan menunjukkan bahwa belanja daerah di sektor pendidikan dan kesehatan, meskipun terbatas, mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di TTU.

Kedua, kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal menyebabkan Pemerintah Kabupaten TTU memiliki ruang fiskal yang sangat terbatas untuk melakukan belanja modal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi, dan fasilitas ekonomi lainnya. Belanja daerah di TTU masih didominasi oleh belanja rutin (operasional) yang mencapai lebih dari 60% dari total belanja, sementara belanja modal yang dapat mendorong kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru relatif kecil. Akibatnya, peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan yang ada tidak cukup kuat untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Selain itu, struktur ekonomi TTU yang didominasi sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah menyebabkan peningkatan pendapatan daerah tidak serta merta diikuti oleh peningkatan PDRB per kapita yang bermakna. Sementara itu, tingkat pengangguran

terbuka yang tidak terpengaruh mengindikasikan bahwa belanja daerah belum mampu menciptakan lapangan kerja baru yang cukup untuk menyerap angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda yang setiap tahun bertambah.

Ketiga, temuan ini memperkuat pandangan (Stiglitz, 2000) bahwa kapasitas fiskal bukan hanya menggambarkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan, tetapi juga sejauh mana pendapatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten TTU, meskipun kapasitas fiskal rendah, dana yang tersedia (termasuk dana transfer) cukup efektif untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan IPM. Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, diperlukan lebih dari sekadar peningkatan kapasitas fiskal. Dibutuhkan strategi pembangunan ekonomi yang lebih komprehensif yang melibatkan investasi swasta, peningkatan iklim usaha, pengembangan sektor unggulan daerah, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Keempat, temuan ini juga memperkuat penelitian (Murshed *et al.*, 2022) bahwa kapasitas fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial di negara berkembang, namun berbeda dengan penelitian (Sri Adipura, Rahayu and Junaidi, 2022) yang menemukan pengaruh signifikan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik Kabupaten TTU yang masuk dalam kategori daerah 3T dengan tingkat ketergantungan fiskal yang jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jambi. Dengan kata lain, konteks wilayah sangat mempengaruhi bagaimana variabel fiskal berinteraksi dengan pembangunan ekonomi. Di daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah, dampak peningkatan kapasitas fiskal lebih terasa pada aspek sosial kemanusiaan dibandingkan aspek ekonomi makro.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa rendahnya kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan di Kabupaten TTU disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, terbatasnya potensi pendapatan asli daerah akibat struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian tradisional; kedua, masih lemahnya administrasi perpajakan daerah; ketiga, tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 60% total pendapatan daerah.

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa alokasi belanja daerah lebih banyak diarahkan pada belanja rutin (operasional) dibandingkan belanja modal yang produktif. Hal ini menyebabkan peningkatan kapasitas fiskal belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi karena anggaran pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masih terbatas.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan memiliki pengaruh yang signifikan namun terbatas terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Secara parsial maupun simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian, kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, maupun tingkat pengangguran terbuka.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada jumlah sampel yang terbatas (10 tahun observasi) serta hanya menggunakan dua variabel independen. Nilai koefisien determinasi yang masih rendah ($R^2 < 0,6$) pada beberapa indikator mengindikasikan masih banyak faktor lain yang memengaruhi pembangunan ekonomi di luar model penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan variabel seperti kualitas belanja pemerintah, tingkat investasi daerah, dan infrastruktur dasar, serta menggunakan data dengan periode waktu yang lebih panjang atau pendekatan kualitatif untuk memperkuat temuan statistik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara beserta jajarannya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Arina Romarina, S.E, M.Ec, Dev selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, S. and Susetyo, D. (2016) 'Pengaruh PDRB perkapita , jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan', 14(1), pp. 22–30https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8745

Arafah, N. (2023) 'Analysis of the Effect of Regional Financial Independence on Economic Growth and Poverty Level of Regional Communities in West Kotawaringin Regency', *Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya : GROWTH*, 8(1), pp. 17–22. Available at: https://doi.org/10.52300/grow.v8i1.8506

Auxiliadora, I. *et al.* (2024) 'Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara', 2(3), pp. 40–47. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898

Azwar, A. (2023) 'Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021', *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), pp. 1–25. Available at: https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i1.2118

Azwari, P.C. (2024) 'Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Di Sumatera Selatan Periode 2013 – 2023', 13(2), pp. 95–106. https://doi.org/10.47942/iab.v13i2.1675

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. (2024). *Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten TTU.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024*. BPS Provinsi NTT.

Bahrullah, A. (2024) 'Impact Analysis of the Influence of Institutional Capacity and the Use of Performance-Based Budgeting on Original Regional Revenue Receipts in the Tanggerang Regency Area', *Perspektif*, 13(2), pp. 552–559. Available at: https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11234

Brundtland, G.H. (2017) 'Our Common Future ("The Brundtland Report"): World Commission on Environment and Development', *The Top 50 Sustainability Books*, pp. 52–55. Available at: https://doi.org/10.4324/9781351279086-15.

Creswell, J.W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dadang, S. (2020) 'The Fiscal Capacity of the New Autonomous Region (DOB) in Increasing Economic Growth and Eradication of the Poor', *Jurnal Bina Praja*, 12(1), pp. 75–87. Available at: https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.75-87

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data Kapasitas Fiskal Daerah 2015-2024*. Kementerian Keuangan RI. https://djpk.kemenkeu.go.id

Halim (2007) 'Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah', *Kinerja*, 8(2), pp. 209–210. Available at: https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898.

John Cresswell (2013) *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.).*, *SAGE Publication*. Available at: https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40.

Kurniati Kurniati and Subhan Purwadinata (2025) 'Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023', *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(1), pp. 223–232. Available at: https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.1234

Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan*. RajaGrafindo Persada

Murshed, S.M. *et al.* (2022) 'Fiscal Capacity, Democratic Institutions and Social Welfare Outcomes in Developing Countries', *Defence and Peace Economics*, 33(3), pp. 280–305. Available at: https://doi.org/10.1080/10242694.2022.2035644

Nabillia, N. *et al.* (2023) 'The Influence of Regional Financial Independence and Government Spending on Economic Growth and Poverty', *Journal of Economics, Management and Trade*, 29(10), pp. 130–141. Available at: https://doi.org/10.9734/jemt/2023/v29i101145

Nalien, E. M., Haykal, M. I., Utomo, D. D., & Ardiensyah. (2025). *Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui implementasi sistem digital dan peran camat/lurah di Kota Baubau*. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126–132. URL: http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Rantebua, S., Rosnawintang, R. and Suriadi, L.O. (2020) 'Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), pp. 43458–43466. Available at: https://doi.org/10.33772/jpep.v5i1.11671 (ojs.uho.ac.id)

Romarina, A. (2025) 'Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat', 4, pp. 2124–2132. Available at: https://doi.org/10.56709/mrj.v4i4.945

Salma Nazikha, R. and Rahmawati, F. (2021) 'Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), pp. 120–134. Available at: https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134

Sri Adipura, I., Rahayu, S., & Junaidi. (2022). *The effect of fiscal decentralization, regional financial independence, effectiveness and efficiency on economic growth and human development index as intervening variables (Empirical study on regency/city government in Jambi Province 2016–2019)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 82–92. URL: https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/16267 (journals.unisba.ac.id)

Stiglitz (1990) 'Economics of the public sector', *Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit*, 5(3), pp. 267–273. Available at: https://doi.org/10.1080/02690949008726060.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryahadi, M.Y., dkk. (2024). Analysis of Regional Financial Capability of Districts/Municipalities in Central Java Province in the Implementation of Regional Autonomy in 2018-2022. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7: 1060–1071.

Syekh, I., Cirebon, N., & Cirebon, U. A. (2024). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(3), 84–91. https://doi.org/10.36312/jcm.v5i3.2977